

RESENSI BUKU MEMAHAMI PEMILU DAN GERAKAN POLITIK KAUM DIFABEL

Muhammad Akbar Satriawan

Judul buku	: <i>Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel</i>
Penulis	: Ishak Salim, dkk.
Penerbit	: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) JL Wonosari KM 8 Gamilan, Sendangtirto, Berbah, Sleman
Tebal	: XII+138 halaman
Ukuran	: 75.5x25.5 Centi meter
Cetakan Pertama	: Februari 2014
Kota Terbit	: Yogyakarta

Pemilu 2014 menjadi ajang penentu bagi berlangsungnya kedaulatan rakyat Indonesia, sekaligus pertarungan politik antar kandidat partai politik untuk meraih suara rakyat. Pemilu bertujuan untuk menentukan pembagian kursi legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan kita menganut sistem presidensial dengan menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan pusat dan menganut sistem otonomi daerah dalam pemerintahan daerah yang mengharuskan adanya wakil-wakil daerah dalam kancah legislasi atau disebut juga sistem distrik majemuk.

Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan sehingga tidak terdapat diskriminasi bagi difabel yang memiliki hak politik pada pemilu tersebut. Untuk mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi difabel dan agar mereka dapat memilih wakil yang mampu menampung aspirasi politik, maka perlu diwujudkan pemilu yang

aksesibel bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi, menjamin hak politik setara bagi difabel sangat penting demi pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilu.

Buku yang diterbitkan oleh SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) ini memberikan solusi untuk terciptanya pemilu aksesibel bagi difabel yang selama ini, dengan sistem pemilu yang ada, difabel cenderung belum mampu menyalurkan hak politiknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang bisa membantu mereka dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu dari mulai persiapan (pra-pemilu) sampai pemilu itu sendiri.

Buku yang ditulis secara bergotong royong oleh Ishak Salim, Raisal Suaib, M. Joni Yulianto, Purwanti, M. Syafi'i, Ananto Sulistyono dan Romanu Solikin ini mengkritisi fenomena yang terjadi mengenai sistem pemilu di Indonesia, yang dianggap belum mampu mengakomodir hak-hak politik kaum difabel. Hal ini dibuktikan secara gamblang dalam buku ini, dengan fakta-fakta yang diambil di media massa sekaligus pernyataan dari penyandang disabilitas yang mengalami pengalaman kurang menyenangkan pada saat mengikuti pemilu. Di sisi lain, buku ini juga menyebutkan fakta bahwa masih ada keluarga yang menganggap difabel sebagai aib dan warga negara kelas dua, sehingga seringkali tidak didaftarkan untuk mengikuti pemilu. Hal ini tentunya menjadi "PR" besar bagi KPU dan bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pada pemilu sekaligus bagi masyarakat umum untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, agar tidak terjadi diskriminasi dan asas kesetaraan pun akan terwujud.

Buku ini juga menggambarkan sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia, yakni menggunakan sistem pemilu perwakilan berimbang dengan suara terbanyak. Disebutkan dalam buku ini pula bahwa sistem perhitungan suara pada sistem pemilu di Indonesia menggunakan rumus kuota hare yakni jumlah suara dibagi jumlah kursi dan dicontohkan pula mekanisme penghitungan suara dari beberapa sistem pemilu lainnya yang sejatinya di negara dengan sistem pemerintahan demokrasi terdapat 4 sistem pemilu, di antaranya adalah sistem perwakilan berimbang, sistem pluralitas/ mayoritas, sistem semi proporsional (sistem campuran) dan sistem lainnya.

Selain memberikan kritik terhadap sistem pemilu di Indonesia yang belum mampu mengakomodir hak politik kaum difabel serta

memberikan solusinya, buku ini juga menggambarkan permasalahan yang seringkali dihadapi kaum difabel di masa pemilu mulai tahapan persiapan, masa kampanye, masa pencoblosan sampai pra-pemilu yang mengakibatkan kurang tersalurkannya aspirasi kaum difabel sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang tentunya juga memiliki hak pilih. Buku ini juga membahas penyelenggaraan pemilu 2014, di mana difabel kesulitan memperoleh informasi. Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya media yang bisa membantu mereka dalam memperoleh informasi tentang kandidat calon legislatif, partai politik hingga mekanisme pencoblosan pada tahapan pemungutan suara.

Penyediaan media yang aksesibel dijadikan solusi dalam buku ini sebagai cara untuk membantu difabel dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemilu, baik itu interpreter atau penerjemah bahasa isyarat untuk tuna rungu, *template* dan pengumuman braille untuk tuna netra, serta gedung pertemuan dan toilet aksesibel untuk tuna daksa yang menjadi tempat mereka memperoleh informasi yang terkait dengan pemilu. Selain itu, buku ini juga mengajak warga difabel untuk aktif menggali informasi yang berkaitan dengan hal-hal tentang pemilu, mulai dari profil calon legislatif, visi dan misi yang ditawarkan, aktifitas sosial kandidat calek dan sebagainya, melalui diskusi dengan kandidat calon legislatif, organisasi difabel, KPU, bawaslu, keluarga, teman dan lingkungan sosial lainnya. Difabel penting untuk memiliki informasi yang jelas terkait pemilu dan segala yang berkaitan dengannya. Selain itu, difabel juga penting untuk berperan dalam mengawasi jalannya pemilu, dari mulai pra-pemilu hingga paska pemilu agar warga difabel bisa memberikan pengaduan di kala terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu. Buku ini juga menekankan difabel untuk memilih kandidat yang mampu memperjuangkan hak-hak kaum difabel.

Solusi lain yang juga dijelaskan secara gamblang dalam buku ini adalah pentingnya tempat pemungutan suara aksesibel bagi tuna daksa, penerjemah bahasa isyarat untuk memanggil tuna rungu dan alat bantu coblos berupa *template* braille bagi tuna netra, serta pendampingan bagi tuna grahita untuk menyalurkan hak politik mereka pada pesta demokrasi yang berlangsung tahun ini.

Dalam buku yang dikarang secara bunga rampai ini juga digambarkan perjuangan pergerakan politik kaum difabel yang

berusaha mengadvokasi hak-hak mereka untuk menciptakan infrastruktur yang aksesibel, pendidikan inklusif dan kebijakan sosial yang merupakan hak difabel. Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas di Solo, dilakukan tahun 2005 ketika Joko Widodo berhasil terpilih sebagai walikota Solo, untuk memunculkan peraturan daerah yang berkaitan dengan aksesibilitas infrastruktur kota. Hasilnya adalah, munculnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, yang mengatur aksesibilitas pada lalu lintas, jalan, pasar, mal, halte bus, stasiun kereta dan lain-lain, sehingga kota Surakarta menjadi salah satu kota inklusi. Contoh lain adalah adanya jaminan kesehatan yang sudah berhasil diperjuangkan oleh aktifis difabel. Buku ini juga menggambarkan peran serta kaum difabel dalam pergerakan politik, melalui perjuangan yang dilakukan oleh Widi dan Dodi, penyandang disabilitas peserta pendidikan politik yang dilaksanakan oleh SIGAB, yang pada mulanya mengalami diskriminasi sosial dari lingkungan mereka. Mereka tersadar untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak-hak difabel. Kemampuan berpolitik dan advokasi membuat Dodi dan Widi menjadi manusia yang berkontribusi bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi bagi difabel.

Dari berbagai hal yang digambarkan dalam buku ini, memberikan sebuah pelajaran bahwa kekurangan bukan sebuah hambatan sosial bagi seseorang, melainkan sebuah motivasi untuk menjadikan sebuah kehidupan sosial seseorang menjadi lebih bermakna dengan menunjukkan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, dibalik sebuah kekurangan yang dimilikinya.

Hal yang unik dalam buku ini adalah bagaimana upaya advokasi dan perjuangan politik kaum difabel yang telah dilakukan dalam mengawal pemilu, sehingga kemungkinan terwujudnya pemilu aksesibel bukanlah sebuah angan belaka, melainkan dapat menjadi realitas politik di sebuah negara demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat ini. Buku ini juga menekankan prinsip dalam mewujudkan kepedulian terhadap kepentingan kaum difabel, bukan melalui rasa belas kasihan yang berlebihan, namun dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan aksesibilitas. Selain itu, pengalaman-pengalaman perjuangan politik kaum difabel yang digambarkan dalam buku ini memberikan banyak

pelajaran berharga dan menyadarkan pembaca bahwa difabel mampu berkiprah di ranah politik dan juga ranah sosial.

Kehadiran buku yang diterbitkan oleh SIGAB ini mampu memberikan pendidikan politik praktis sekaligus untuk mewujudkan pemilu inklusi. Buku ini merupakan informasi yang tidak banyak diketahui orang, misalnya mengenai rumus perhitungan suara yang digunakan di Indonesia pada masa pemilu, yakni menggunakan rumus kuota hare: membagi jumlah suara dengan jumlah kursi yang akan ditempati oleh wakil rakyat dalam kancah legislatif.

Selain memberikan pendidikan politik, buku ini juga menjelaskan secara gamblang permasalahan yang dihadapi kaum difabel dengan ilustrasi gambar sehingga buku terbitan SIGAB ini mudah dipahami oleh warga non-difabel. Keunikan lain yang ada dalam buku "Memahami pemilu dan gerakan politik kaum difabel" ini adalah isi buku yang diperoleh dari pengalaman langsung. Pengurus Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel dalam buku ini mengemas kiprah difabel dalam politik, khususnya pemilu dengan catatan-catatan pengalaman yang mereka alami serta hasil diskusi mereka dengan organisasi difabel yang juga mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Sayangnya dalam buku ini tidak digambarkan pengalaman politik difabel di luar negeri, yang jika itu digambarkan, tentunya akan membuat buku ini semakin komprehensif. Selain itu, dengan menggambarkan pengalaman pemilu bagi difabel di luar negeri, dapat menjadi referensi bagi aparat pemerintah agar mampu mengakomodir kepentingan kaum difabel.

Buku yang diterbitkan oleh SIGAB ini akan lebih menarik jika dalam isi buku disertakan juga solusi pendampingan bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya, terlebih lagi bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi difabel grahita. Hal ini sejatinya perlu bagi keluarga yang masih menganggap difabel itu sebagai aib.

Buku ini diharapkan dapat menjadi awal bagi kajian yang lebih mendalam lagi dan harapannya, muncul karya-karya baru yang mengkaji gerakan politik kaum difabel untuk mewujudkan sistem perpolitikan demokrasi inklusif, yang menjunjung tinggi

kesetaraan terhadap semua kalangan yang berdaulat atas negara. Upaya untuk mewujudkan sebuah sistem perpolitikan inklusif, yang di dalamnya terdapat sistem pemilu aksesibel akan terwujud jika ada kesadaran masyarakat sekaligus pemerintah bahwa manusia itu tidak semuanya sama, melainkan berbeda-beda. Pentingnya kesadaran dari semua pihak bahwa semua perbedaan itu merupakan realitas alamiah dalam kehidupan sosial masyarakat, di sisi lain jangan sampai ada pihak yang terdiskriminasi karena perbedaan-perbedaan ini, khususnya dalam menyalurkan aspirasi politik, yang mana hal ini kerap dialami oleh penyandang disabilitas.

Buku ini mendorong difabel untuk melakukan lobi dan kontrak politik dengan kandidat yang mencalonkan diri untuk mewakili rakyat di parlemen dan pemerintahan pada umumnya. Dalam persoalan memilih wakil rakyat dibutuhkan kecermatan yang harus dimiliki semua kalangan dan khususnya difabel agar aspirasi mereka mampu terakomodir dalam setiap kebijakan atau undang-undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah.

Terbitnya buku ini merepresentasikan upaya advokasi yang dilakukan oleh SIGAB untuk mewujudkan karakter penyandang disabilitas yang mandiri sekaligus mampu mengawasi serta mengkritisi fenomena politik yang terjadi khususnya di Indonesia dan menjadi awal untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara inklusif dan aksesibel bagi difabel. Di sisi lain, buku ini juga mencoba memberikan pelajaran pada kandidat yang bertarung dalam meraih suara rakyat, untuk menyampaikan visi misi mereka ke media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Difabel penting untuk mengetahui profil caleg yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen dan hal ini menjadi tanggung jawab dari para kandidat untuk memberikan informasi yang aksesibel kepada mereka mengenai profil diri dan visi politik para kandidiat tersebut, sejauh mana mereka berpihak pada kepentingan difabel.

Muhammad Akbar Satriawan adalah Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN sunan KaliJaga Yogyakarta.